

Analisis Penerapan Psak No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba

Winarti ^{1✉} Jumriani ²

^{1,2}STIE Indonesia Makassar

Abstrak

Fenomena yang ditemukan pada RSUD Kab. Buol telah menerapkan PSAK 45 tetapi belum menggunakannya secara efisien dan efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis apakah PSAK No. 45 (revisi 2011) telah diterapkan secara efisien dan efektif pada penyajian laporan keuangan RSUD Kabupaten Buol. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Objek penelitian adalah laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol. Metode analisis data yang digunakan adalah metode komparatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, RSUD Kab, Buol telah menerapkan PSAK No. 45 didalam laporannya dengan baik. Namun belum efektif dan efisien karena ada dua unsur dalam laporan keuangan RSUD Kab. Buol yang tidak sesuai dengan PSAK No. 45, yaitu klasifikasi asset neto terikat dan tidak terikat, serta klasifikasi perubahan kelompok asset neto.

Kata Kunci: *Laporan Keuangan; Entitas Nirlaba; Penerapan PSAK (45).*

Copyright (c) 2023 Winarti & Jumriani

✉ Corresponding author :

Email Address : winarti@stieindonesia-stikimks.ac.id , jumriani@stieindonesia-stikimks.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan standar akuntansi di Indonesia sangatlah pesat. Pada tahun 2012, ditargetkan terdapat empat pilar standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, antara lain SAK Umum yang terdiri dari PSAK berbasis IFRS dan PSAK Non IFRS (Syariah), SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Standar Pelaporan Keuangan Untuk Entitas Nirlaba. Pengaturan atas ketiga yang disebutkan pertama sangatlah jelas untuk diterapkan dan konsisten untuk entitas laba atau profit. Namun, terkait untuk entitas nirlaba yang dapat dikatakan penerapan atas standar yang dimiliki masih berada dalam area "abu-abu", dikatakan dalam area ini karena standar pelaporan keuangan untuk entitas nirlaba hanya memberikan pedoman atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, perihal pengakuan, pengukuran, dan penilaian harus mengacu kepada standar lainnya.

Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan atas laporan keuangan entitas nirlaba yakni penerapan manakah yang dapat digunakan perihal pengakuan, pengukuran, serta penilaian (pengukuran lanjutan) transaksi-transaksi yang dilakukan? Serta pertanyaan selanjutnya apakah laporan keuangan entitas nirlaba sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia? Hal ini menarik perhatian sehingga menjadi signifikan untuk dilakukan penelitian atas kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku di Indonesia

yang di terapkan oleh entitas nirlaba serta transparansi dan akuntabilitas yang dimiliki oleh entitas nirlaba.

Dengan dikaitkannya atas korvegensi IFRS yang semakin marak dalam beberapa tahun terakhir ini, dimana seperti yang telah diketahui bahwa tahapan puncak atas korvegensi terjadi pada tahun 2012 ini, maka salah satu PSAK yang sesuai dengan korvegensi IFRS tersebut adalah PSAK 45 (Revisi 2011) terkait dengan Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, dimana exposure draf atas peraturan ini telah di buat pada 8 april 2011, dan akan berjalan efektif pada 1 januari 2012.

Dengan melihat perubahan, perkembangan peraturan dan standar yang semakin lengkap dan kompleks atas entitas nirlaba, dapat dijadikan sebagai bukti bahwa keberadaan organisasi nirlaba dalam tatanan perekonomian adalah signifikan dan memiliki dampak. Dampak positif yang diharapkan atas adanya revisi PSAK tersebut, adalah laporan keuangan entitas nirlaba semakin relevan, memadai, lebih mudah dipahami, dan memiliki daya banding yang tinggi. Namun, disisi lain tidak dapat dipungkiri pula bahwa dengan adanya perubahan atas peraturan tersebut dapat menyebabkan suatu konflik baru yaitu apakah perubahan yang ada dapat tetap membuat kesesuaian atau sebaliknya ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan standar-standar yang berlaku, antara lain SAK Umum, SAK ETAP, dan PSAK 45. Perlu dilakukan analisis terhadap kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar yang berlaku, guna menjaga dan memenuhi esensi atas laporan keuangan dan standar (PSAK).

Seperti halnya perusahaan, yayasan juga membutuhkan ilmu akuntansi untuk mencatat pengeluaran dan pendapatannya. Guna memberikan suatu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka Yayasan juga dituntut untuk dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan aturan atau standar yang telah ada. Di era globalisasi sekarang ini akuntansi juga dapat digunakan yayasan untuk membantu dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting dibidang keuangan. Keputusan yang telah diambil tidak hanya berpengaruh kepada kondisi keuangan yang ada di Yayasan. Bentuk konkrit yang dilakukan oleh Yayasan adalah dengan cara membenahi administrasinya serta mempublikasi laporan keuangannya setiap tahun.

Akuntansi dibutuhkan oleh yayasan untuk menghasilkan informasi keuangan maupun untuk meningkatkan mutu pada yayasan itu sendiri. Dengan dibutuhkannya informasi keuangan tersebut pada entitas nirlaba, maka dikeluarkanlah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45. PSAK 45 (revisi 2011) menjelaskan tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba, yang bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. Dengan adanya pedoman pelaporan, diharapkan laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba (revisi PSAK 45 (2011): 2). Didalam PSAK 45 diatur mengenai bagaimana bentuk format dari laporan keuangan yang terdapat pada Yayasan, berisi mengenai laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Standar ini juga mengatur bagaimana model pencatatannya dan pelaporannya.

Ada beberapa penelitian tentang PSAK No. 45 salah satunya dilakukan oleh Fatih (2015) yang mencoba mengimplementasikan PSAK No. 45 (Study Kasus pada Yayasan Global Tarbiyyatul Arifin Kecamatan Pakis Kabupaten Malang), hasilnya menunjukkan

bahwa objek penelitian sudah menyusun laporan keuangan, namun hanya sebatas penerimaan dan pengeluaran serta jumlah asset yang dimilikinya. Memang bagi yayasan hal tersebut saat ini sudah cukup, namun kedepan dengan prospek yayasan yang cerah penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan standart akuntansi menjadi langkah awal yang bagus meski membutuhkan waktu untuk adaptasi. Pertimbangan itulah yang mendorong peneliti untuk mencoba mengimplementasikan PSAK 45 dalam penyusunan laporan keuangan yayasan pesantren global tarbiyyatul arifin. Dengan kondisi yayasan yang tidak terlalu kompleks format laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 dapat di implementasikan di yayasan dengan dasar laporan posisi keuangan awal per 31 Maret 2015.

Peneliti mencoba untuk menyusun format untuk laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas posisi keuangan. Repi dk (2015) menganalisis PSAK 45 (pada STIKES Muhammadiyah Manado), hasilnya tidak jauh berbeda dengan penelitian fatih yang menunjukkan bahwa objek penelitian belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan keuangan nirlaba yang terdapat dalam PSAK No. 45, karena untuk penyusunannya objek penelitian hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari Yayasan yang bentuknya masih berupa neraca saldo. Objek penelitian juga belum menilai penyusutan asset, namun baru mencatatnya dalam bentuk inventaris. Walaupun tidak mengikuti format laporan keuangan yang ditetapkan oleh Okatan Akuntan Indonesia, namun secara umum tujuan penyusunan laporan keuangan dari objek tersebut telah tercapai, walaupun masih ada informasi-informasi tertentu belum jelas.

Fenomena yang ditemukan pada RSUD Kab. Buol telah menerapkan PSAK 45 tetapi belum menggunakannya secara efisien dan efektif. Dilihat dari pentingnya laporan keuangan bagi sebuah entitas-entitas nirlaba terutama pada yayasan (rumah sakit umum), maka perlu ada suatu aturan baku yang mengatur mengenai penyusunan laporan keuangan entitas nirlaba. IAI mengeluarkan PSAK mengenai entitas nirlaba yaitu PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatas Atas Laporan Keuangan. Oleh karenanya transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada donator, regulator, penerima manfaat dan publik secara umum.

Warren et al. (2015) dalam Fakhimuddin et al. (2021) mendefinisikan akuntansi (accounting) sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sistem informasi mengumpulkan dan memproses data-data yang berkaitan dan kemudian menyebarkan informasi keuangan kepada pihak yang tertarik. Akuntansi adalah "Bahasa bisnis" (language of business) karena malalui akuntansi-lah informasi bisnis dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan (Puspitawati, 2021). Akuntansi merangkum transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan kemudian memproses dan menyajikannya dalam bentuk laporan yang diberikan kepada para pengguna (falih Chichan & Alabdullah, 2021). Informasi yang dihasilkan dari akuntansi, menjelaskan kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu dan kondisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (Lisa, 2021)

Sugiarto (2002) dalam Masita & Purwohandoko (2020) Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak luar, seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, serta pemerintah. Prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi (Aset = Liabilitas + Ekuitas).

Akuntansi keuangan berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan berkala dari hasil pencatatan tersebut. Laporan ini yang disusun untuk kepentingan umum dan biasanya digunakan pemilik perusahaan untuk menilai prestasi manajer atau dipakai manajer sebagai pertanggungjawaban keuangan terhadap para pemegang saham (Sari & Indrarini, 2020). Hal penting dari akuntansi keuangan adalah adanya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan aturan-aturan yang harus digunakan di dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan eksternal. Dengan demikian, diharapkan pemakai dan penyusun laporan keuangan dapat berkomunikasi melalui laporan keuangan ini, sebab mereka menggunakan acuan yang sama yaitu SAK. SAK ini mulai diterapkan di Indonesia pada 1994, menggantikan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984 (Muda et al., 2018).

Standar akuntansi keuangan merupakan pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang (Xu et al., 2019). Standar akuntansi keuangan memuat konsep standar dan metode yang dinyatakan sebagai pedoman umum dalam praktik akuntansi perusahaan dalam lingkungan tertentu. Standar ini dapat diterapkan sepanjang masih relevan dengan keadaan perusahaan yang bersangkutan. Akuntansi Keuangan di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yaitu IAI (Bangsa, 2018). Indonesia juga telah memiliki kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Jika terdapat pertentangan antara kerangka dasar dan Standar Akuntansi Keuangan maka ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang harus diunggulkan relatif terhadap kerangka dasar ini. Karena kerangka dasar ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan dalam mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan di masa datang dan dalam peninjauan kembali terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka banyaknya kasus konflik tersebut akan berkurang dengan berjalannya waktu (IAI, 2009).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 merupakan standar khusus untuk entitas nirlaba. Karakteristik entitas nirlaba sangat berbeda dengan entitas bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba (Furqan et al., 2020). Perbedaan terletak pada cara entitas memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Entitas memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari entitas yang bersangkutan (IAI, 2018). Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, contohnya penerimaan sumbangan. Pada beberapa bentuk entitas nirlaba meskipun tidak ada kepemilikan, entitas tersebut mencukupi modalnya dari hutang dan mendanai kegiatan operasionalnya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada public (Zhao et al., 2017). Akibatnya pengukuran jumlah, saat dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja yang penting bagi para pengguna laporan keuangan entitas tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba (Bai et al., 2019). Pihak pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai (IAI, 2018) 1) Jasa yang diberikan oleh entitas nirlaba dan kemampuannya untuk terus

memberikan jasa tersebut. 2) Cara manajer melaksanakan tanggung jawab dan aspek lain dari kinerjanya.

Tujuan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai 1) Jumlah dan sifat asset, liabilitas, dan asset neto entitas nirlaba. 2) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah nilai dan sifat asset neto. 3) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antar keduanya. 4) Cara entitas nirlaba mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lain yang berpengaruh pada likuiditasnya. 5) Usaha jasa entitas nirlaba.

Dalam Syamsudin et al., (2017) Laporan keuangan entitas nirlaba menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (revisi 2011) meliputi:

Laporan Posisi Keuangan Pada Akhir Periode Laporan

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai asset, liabilitas, dan asset neto serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu (Yin & Tian, 2017). Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan, dan informasi dalam laporan keuangan lain dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain untuk menilai 1) Kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan. 2) Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan Aktivitas

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat asset neto; hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program jasa (Umar et al., 2019). Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode; menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas nirlaba dan memberikan jasa; dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Perubahan Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh SAK (Standar Akuntansi Keuangan) (Bahri & Komarudin, 2019). Laporan aktivitas menyajikan jumlah neto keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental atau peristiwa lain yang berada di luar pengendalian entitas nirlaba dan manajemen. Misalnya, keuntungan atau kerugian penjualan tanah dan gedung yang tidak digunakan lagi.

Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung (Lev, 2018). Klasifikasi secara fungsional bermanfaat untuk membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain dalam menilai pemberian jasa dan penggunaan sumber daya. Di samping penyajian klasifikasi beban secara fungsional, entitas nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Misalnya, gaji, sewa, listrik, bunga, dan penyusutan (Fuadah & Setiyawati, 2020).

Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi entitas nirlaba. Pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama (Montoya, 2018). Aktivitas pendukung meliputi semua aktivitas selain program pemberian jasa. Umumnya, aktivitas pendukung meliputi aktivitas manajemen dan umum, pencarian dana, dan pengembangan anggota. Aktivitas manajemen dan umum meliputi pengawasan, manajemen bisnis, pembukuan, penganggaran, pendanaan, dan aktivitas administratif lain, serta semua aktivitas manajemen dan administrasi kecuali program pemberian jasa atau pencarian dana (Suliyantini & Kusmuriyanto, 2017). Aktivitas pencarian dana meliputi publikasi dan kampanye pencarian dana; pengadaan daftar alamat pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali; pelaksanaan acara khusus pencarian dana; pembuatan dan penyebaran manual, petunjuk, dan bahan lain serta pelaksanaan aktivitas lain dalam rangka pencarian dana dari individu, yayasan, pemerintah, dan lain-lain. Aktivitas pengembangan anggota meliputi pencarian anggota baru dan pengumpulan iuran anggota, hubungan dan aktivitas sejenis (Zhao et al., 2017).

Laporan Arus Kas Untuk Suatu Periode Pelaporan

Tujuan umum laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menggunakan arus tersebut (Bai et al., 2019). Penilaian atas kemampuan menghasilkan kas dikaitkan dengan aktivitas yang dijalankan perusahaan, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi adalah indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa bantuan sumber pendanaan dari luar. Informasi tentang komponen spesifik atas arus kas operasi historis adalah berguna, dalam hubungannya dengan informasi lain, dalam memprakirakan arus kas operasi masa depan (Umar et al., 2019).

Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas investasi adalah penting karena arus kas tersebut merepresentasikan sejauh mana pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang diintensikan untuk menghasilkan penghasilan dan arus kas masa depan. Hanya pengeluaran yang menghasilkan pengakuan atas asset dalam laporan posisi keuangan yang memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi (Bahri & Komarudin, 2019).

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tujuan utama catatan atas laporan keuangan adalah memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan entitas nirlaba (Fuadah & Setiyawati, 2020). Informasi dalam catatan atas laporan keuangan mencakup antara lain pendahuluan, kebijakan akuntansi, penjelasan atas pos-pos neraca, penjelasan atas pos-pos laporan aktivitas, penjelasan atas pos-pos laporan arus kas, kewajiban kontinjensi, informasi tambahan serta pengungkapan lainnya.

METODOLOGI

Tempat dari penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol. Subjek penelitian adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol sedangkan objek penelitian adalah laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu, jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka, (Sugiyono, 2010). Dalam hal ini data kuantitatif-nya adalah laporan keuangan. Sumber data dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Contoh data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan sumber data sekunder.

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penelitian. Data yang dikumpulkan akan bermakna dan berguna dalam menjawab permasalahan penelitian jika diolah dan dianalisis. Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif dengan pendekatan kualitatif. Apabila penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK No. 45 maka penyajian akun tersebut dikatakan sesuai. Apabila penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK No. 45 maka penyajian akun tersebut dikatakan tidak sesuai.

Penelitian komparatif adalah penelitian yang akan membandingkan antara dua variable. Penelitian komparatif akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang, dan kelompok. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Format laporan keuangan yang digunakan

Tabel 1. Format laporan keuangan yang digunakan

No	PSAK No. 45	Laporan keuangan RSUD Kab. Buol	Sesuai Atau Tidak Sesuai
1	Laporan Posisi Keuangan Laporan Aktivitas Laporan Arus kas Catatan Atas Laporan Keuangan	Neraca Laporan Operasional Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan	Sesuai

Tabel 2. Laporan posisi keuangan (PSAK No. 45) dan laporan neraca (RSUD Kab. Buol)

ENTITAS NIRLABA Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 20xx (PSAK No. 45)		RSUD MOKOYURLY NERACA PER 31 DESEMBER 2017 (RSUD Kab. Buol)	
20X2		2017	
ASET		ASET	
Aset Lancar		ASET LANCAR	
Kas dan setara kas	188	Kas dan setara kas	14,900,903,976
Piutang bunga	5.325	Piutang usaha	2,874,677,418
Persediaan dan biaya di bayar dimuka	1.525	Persediaan	9,859,065,724
Piutang lain-lain	7.562	ASET TETAP	2,167,160,834
Investasi jangka pendek	3.500	Tanah	81,632,017,905
Aset Tidak Lancar		Peralatan dan mesin	1,577,469,875
Properti investasi	13.025	Gedung dan bangunan	61,047,086,656
Aset tetap	154.250	Jalan, jaringan dan irigasi	44,162,591,365
Investasi jangka panjang	545.175	Akumulasi penyusutan	3,966,116,972
Jumlah asset	730.550	ASET LAIN-LAIN	29,121,246,963
		Asset kerjasama operasi	11,990,726,905
LIABILITAS		Total asset	108,523,648,786
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang dagang	6.425	KEWAJIBAN	
Pendapatan diterima di muka yang dapat dikembalikan	-	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7,909,071,126
Utang lain-lain	2.187	Utang usaha	2,548,044,705
Utang wesel	-	Utang pajak	41,679,844
Liabilitas Jangka Panjang		Biaya yang masih harus dibayar	5,319,346,577
Kewajiban tahunan	4.213	Kewajiban jangka pendek lainnya	-
Utang jangka panjang	13.750	Total kewajiban	7,909,071,126
Jumlah liabilitas	26.575		
		EKUITAS	
ASET NETO		EKUITAS	100,614,577,660
Tidak terikat	288.070	EKUITAS TIDAK TERIKAT	100,614,577,660
Terikat temporer (catatan B)	60.855	Ekuitas awal	44,962,390,531
Terikat permanen (catatan C)	355.050	Surplus dan defisit tahun lalu	32,742,093,139
Jumlah asset neto	703.975	Surplus dan defisit tahun berjalan	22,910,093,990
		Total ekuitas	100,614,577,660
Jumlah liabilitas dan asset neto	730.550	Total kewajiban dan ekuitas	108,532,648,786

Tabel 3. Laporan aktivitas (PSAK No. 45) dan laporan operasional (RSUD Kab. Buol)

ENTITAS NIRLABA Laporan Aktivitas Per 31 Desember 20xx (PSAK No. 45)		RSUD MOKOYURLY Laporan Operasional PER 31 DESEMBER 2017 (RSUD Kab. Buol)	
20XX		2017	
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT		PENDAPATAN	
Pendapatan		Pendapatan jasa layanan	32,325,181,971
Sumbangan	21.600	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	
Jasa layanan	13.500	APBD	
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan E)	14.000	APBD-Operasional	15,987,796,203
Penghasilan investasi lain-lain (catatan E)	2.125	APBD-Investasi	27,864,803,622
Penghasilan neto investasi jangka panjang belum direalisasi	20.570	LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH	
Lain-lain	375	Lain-Lain Pendapatan Blud Yang Sah	15,989,865
Jumlah	72.170	Jumlah Pendapatan	76,193,771,661
Asset neto yang berakhir pembatasannya (catatan D) :		BIAYA	
Pemenuhan program pembatasan	29.975	BIAYA OPERASIONAL	

Pemenuhan pembatasan pemerolehan peralatan	3.750	BIAYA PELAYANAN	
Berakhirnya pembatasan waktu	3.125	Biaya Pegawai	759,661,266
Jumlah	36.850	Biaya Bahan	11,181,991,270
Jumlah pendapatan	109.020	Biaya Jasa Pelayanan	14,091,109,993
			26,032,762,529
Beban		BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	
Program A	32.750	Biaya Pegawai	14,894,160,016
Program B	21.350	Biaya Administrasi Kantor	1,840,121,122
Program C	14.400	Biaya Pemeliharaan	223,897,092
Manajemen dan umum	6.050	Biaya Barang dan Jasa	1,657,886,253
Pencarian dana	5.375	Biaya Penyusutan	8,422,868,578
Jumlah beban (catatan F)	79.925	Biaya Umum dan Administrasi Lainnya	20,000,000
Kerugian akibat kebakaran	200	Biaya Bahan	198,048,845
			27,247,981,906
Jumlah	80.125	BIAYA NON OPERASIONAL	
Kenaikan aset neto tidak terikat	28.895	Biaya non operasional	2,933,236
			2,933,236
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER		Jumlah Biaya	53,283,677,671
Sumbangan	20.275	Surplus/Defisit	22,910,093,990
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan E)	6.450		
Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang (catatan E)	7.380		
Kerugian actuarial untuk kewajiban tahunan	(75)		
Asset neto terbebaskan dari pembatasan (catatan D)	(36.850)		
Penurunan aset neto terikat temporer	(2.820)		
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN			
Sumbangan	700		
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan E)	300		
Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang (catatan E)	11.550		
kenaikan aset neto terikat permanen	12.550		
KENAIKAN ASET NETO	38.625		
ASET NETO AWAL TAHUN	665.350		
ASET NETO AKHIR TAHUN	703.975		

Tabel 4. Laporan arus kas (PSAK No. 45) dan laporan arus kas (RSUD Kab. Buol)

ENTITAS NIRLABA Laporan Arus Kas Per 31 Desember 20xx (PSAK No. 45)		RSUD MOKOYURLY Laporan Arus Kas PER 31 DESEMBER 2017 (RSUD Kab. Buol)	
20XX		2017	
AKTIVITAS OPERASI		Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	
Kas dan pendapatan jasa	13.050	Arus Masuk	
Kas dari sumber pemberi daya	20.075	Pendapata Usaha Dari Jasa Layanan	28,979,573,786
Kas dari piutang lain-lain	6.537	Pendapatan APBD/APBN	43,852,599,825
Bunga dan dividen yang diterima	31.425	Pendapatan Usaha Lainnya	15,989,865
Penerimaan lain-lain	375	Penerimaan Pajak	41,679,844
Bunga yang dibayarkan	(955)	Arus Keluar	

Kas yang dibayarkan kepada karyawan dan supplier	(59.520)	Biaya Layanan	23,007,588,621
Utang lain-lain yang dilunasi	(1.062)	Biaya Umum Dan Administrasi	19,403,650,167
kas neto yang diterima (igunakan) untuk aktivitas operasi	(75)	Biaya Umum Lainnya	2,933,236
		Jumlah Asus Kas Dari Aktivitas Operasi	30,475,671,296
AKTIVITAS INVESTASI		Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	
Ganti rugi gari asuransi kebakaran	625	Arus Keluar	
Pembelian peralatan	(3.750)	Perolehan Asset Tetap	28,077,199,713
Penerimaan dari penjualan investasi	190.250	Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	-28,077,199,713
Pembelian investasi	(187.250)	Jumlah Arus Kas Bersih	2,398,471,583
Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi	(125)	Saldo Awal Kas Dan Setara Kas	476,205,835
AKTIVITAS PENDANAAN		Saldo Akhir Kas Dan Setara Kas	2,874,677,418
Penerimaan dari kontribusi terbatas dari :			
Investasi dalam endowment	500		
Investasi dalam endowmen berjangka	175		
Investasi bangunan	3.025		
Investasi perjanjian tahunan	500		
	4.200		
Aktivitas pendanaan lain :			
Bunga dan dividen terbatas untuk reinvestasi	750		
Pembayaran kewajiban tahunan	(362)		
Pembayaran utang wesel	(2.850)		
Pembayaran liabilitas jangka panjang	(2.500)		
	(4.962)		
Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas pendanaan	(762)		
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS			
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	1.150		
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	188		
Rekonsiliasi perubahan dalam asset neto menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi :			
Perubahan dalam asset neto	38.625		
Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam asset neto menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi :			
Depresiasi	8.000		
Kerugian akibat kebakaran	200		
Kerugian actuarial pada kewajiban tahunan	75		
Kenaikan piutang bunga	(1.150)		
Penurunan dalam persediaan dan biaya dibayar dimuka	975		
Kenaikan dalam piutang lain-lain	(813)		
Kenaikan dalam utang dagang	3.800		
Penurunan dalam penerimaan	(1.625)		

dimuka yang dapat dikembalikan		
penurunan dalam utang lain-lain	(1.062)	
Sumbangan terikat untuk investasi jangka panjang	(6.850)	
Bunga dan dividen terikat untuk investasi jangka panjang	(750)	
Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang	(39.500)	
Kas neto diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi	(75)	
Data tambahan untuk aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: Peralatan yang diterima sebagai hibah	350	
Pembebasan premi asuransi kematian, nilai kas yang diserahkan	200	

PEMBAHASAN

Format Pelaporan Yang Digunakan

Hasil penelitian di RSUD Kab. Buol menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kab. Buol pada unsur pertama yaitu format pelaporan yang digunakan terdiri dari laporan neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 45 yang berisi laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Secara umum format pelaporan yang digunakan telah sesuai, namun ada beberapa perbedaan pada penyebutan nama, contohnya pada laporan keuangan RSUD Kab. Buol digunakan istilah laporan operasional sedangkan pada PSAK No. 45 menggunakan istilah laporan aktivitas. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya memiliki makna yang sama, yaitu menyajikan informasi tentang operasi BLU mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLU.

Klasifikasi Asset Dan Liabilitas

Hasil penelitian di RSUD Kab. Buol menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kab. Buol pada unsur kedua yaitu klasifikasi asset dan liabilitas telah sesuai dengan PSAK No. 45. Secara umum bentuk klasifikasi aktiva dan kewajiban telah sesuai, namun ada beberapa perbedaan pada penyebutan nama dan klasifikasinya, sebagai contoh pada laporan keuangan RSUD Kab. Buol asset diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu asset lancar, asset tetap dan asset lain-lain; sedangkan pada PSAK No. 45 aset diklasifikasikan kedalam asset lancar dan asset tidak lancar.

Klasifikasi Asset Neto Terikat Atau Tidak Terikat

Hasil penelitian di RSUD Kab. Buol menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kab. Buol pada unsur ketiga yaitu klasifikasi asset neto terikat atau tidak terikat tidak sesuai dengan PSAK No. 45. Ketidakesesuaian antara laporan keuangan RSUD Kab. Buol dengan PSAK No. 45 dikarenakan adanya perbedaan dalam pencatatan dan pengklasifikasian. Pada laporan keuangan RSUD Kab. Buol dicatat dan diklasifikasikan ke dalam ekuitas tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen (walaupun diklasifikasikan namun seluruh ekuitas dicatat dan dikelompokkan ke dalam ekuitas tidak

terikat); sedangkan PSAK No. 45 dicatat dan diklasifikasikan ke dalam asset neto tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen.

Perubahan Kelompok Asset Neto

Hasil penelitian di RSUD Kab. Buol menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kab. Buol pada unsur keempat yaitu perubahan kelompok asset neto tidak sesuai dengan PSAK No. 45. Ketidaksesuaian antara laporan keuangan RSUD Kab. Buol dengan PSAK No. 45 disebabkan karena tidak adanya klasifikasi jumlah perubahan asset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam satu periode pada laporan operasional laporan keuangan RSUD Kab. Buol.

Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan Dan Kerugian

Hasil penelitian di RSUD Kab. Buol menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kab. Buol pada unsur kelima yaitu klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian telah sesuai dengan PSAK No. 45. Secara umum klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian telah sesuai, hanya saja ada perbedaan pada penyebutan nama dan klasifikasinya, sebagai contoh, yaitu pada laporan keuangan RSUD Kab. Buol digunakan istilah biaya sedangkan pada PSAK No. 45 digunakan istilah beban.

Informasi Pemberian Jasa

Hasil penelitian di RSUD Kab. Buol menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kab. Buol pada unsur keenam yaitu informasi pemberian jasa telah sesuai dengan PSAK No. 45. Secara umum informasi pemberian jasa telah sesuai, hanya saja ada perbedaan pada penyebutan nama dan klasifikasinya, yaitu pada laporan keuangan RSUD Kab. Buol digunakan istilah biaya sedangkan pada PSAK No. 45 menggunakan istilah beban. Selain itu pada PSAK No. 45 terdapat pengklasifikasian fungsionalnya seperti kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung; sedangkan pada laporan keuangan RSUD Kab. Buol biaya diklasifikasikan menurut penggunaan seperti biaya operasional dan non operasional.

Klasifikasi Penerimaan Dan Pengeluaran

Hasil penelitian di RSUD Kab. Buol menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan RSUD Kab. Buol pada unsur ketujuh klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas telah sesuai. Secara umum klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas telah sesuai, namun pada PSAK No. 45 terdapat perubahan dalam asset neto menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi, sedangkan pada laporan keuangan RSUD Kab. Buol tidak diperlukan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu secara keseluruhan, RSUD Kab, Buol telah menerapkan PSAK No. 45 didalam laporannya dengan baik. Namun belum efektif dan efisien karena ada dua unsur dalam laporan keuangan RSUD Kab. Buol yang tidak sesuai dengan PSAK No. 45, yaitu klasifikasi asset neto terikat dan tidak terikat, serta klasifikasi perubahan kelompok asset neto.

Bagi RSUD Kab. Buol diharapkan dapat terus mengikuti perkembangan penyajian laporan keuangan terkhususnya PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba sehingga dalam penyusunan laporan keuangan tahun berikutnya dapat lebih efektif dan efisien. Bagi peneliti, data yang diperoleh dalam penelitian ini hanya berdasarkan data laporan keuangan RSUD Kab. Buol, tanpa mengikuti praktek langsung dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga disarankan untuk peneliti selanjutnya agar tidak hanya terpacu pada laporan keuangan yang sudah ada saja, tetapi dengan mengikuti praktek langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan, agar proses penyusunan laporan keuangan dapat dijabarkan lebih rinci.

Referensi :

- Bahri, R. S., & Komarudin, E. (2019). Computerized of International Financial Report Standard For Good Governance in Small Medium Enterprises. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 662(5), 52009. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/662/5/052009/meta>
- Bai, X., Dong, Y., & Hu, N. (2019). Financial report readability and stock return synchronicity. *Applied Economics*, 51(4), 346–363. <https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1495824>
- Bangsa, I. N. (2018). The effect of internal control systems, accounting systems on the quality of financial statements moderated by organizational commitments. *Accounting Analysis Journal*, 7(2), 127–134. <https://doi.org/10.15294/aaj.v7i2.20616>
- Fakhimuddin, M., Khasanah, U., & Trimiayati, R. (2021). Database management system in accounting: assessing the role of internet service communication of accounting system information. *Research Horizon*, 1(3), 100–105. <https://doi.org/10.54518/rh.1.3.2021.100-105>
- falih Chichan, H., & Alabdullah, T. T. Y. (2021). Does environmental management accounting matter in promoting sustainable development? A study in Iraq. *Journal of Accounting Science*, 5(2), 110–122. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i2.1543>
- Fuadah, H., & Setiyawati, H. (2020). The Effect of the implementation of transparency and accounting information systems on the quality of financial reports. *IJO-International Journal of Business Management* (ISSN 2811-2504), 3(11), 1–12. <https://www.ijojournals.com/index.php/bm/article/view/371>
- Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2019-0173>
- Lev, B. (2018). The deteriorating usefulness of financial report information and how to reverse it. *Accounting and Business Research*, 48(5), 465–493. <https://doi.org/10.1080/00014788.2018.1470138>
- Lisa, O. (2021). Asimetri informasi dan manajemen laba: suatu tinjauan dalam hubungan keagenan. *E-Repository Dosen Universitas Gajayana Malang*. <http://www.ejournal.unigamalang.ac.id/index.php/RDOS/article/view/623>
- Masita, A., & Purwohandoko, P. (2020). Analisis Pengaruh Rasio Keuangan, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Financial Distress pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2018. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(3), 894–908. <https://doi.org/10.26740/jim.v8n3.p894-908>
- Montoya, J. C. C. (2018). The impact of IFRS on financial report quality in Latin America and the Caribbean. *Contaduría y Administración*, 63(2), 13–14. <https://ideas.repec.org/a/nax/conyad/v63y2018i2p13-14.html>
- Muda, I., Harahap, A. H., Ginting, S., Maksum, A., & Abubakar, E. (2018). Factors of quality of

- financial report of local government in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 126(1), 12067. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/126/1/012067/meta>
- Puspitawati, L. (2021). Strategic information moderated by effectiveness management accounting information systems: Business strategy approach. *Jurnal Akuntansi*, 25(1), 101–119. <https://doi.org/10.24912/ja.v25i1.727>
- Sari, D., & Indrarini, R. (2020). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Resiko Financial Distress Perbankan Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Bankometer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 557–570. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1191>
- Suliyantini, L., & Kusmuriyanto, K. (2017). The Effect of Human Resources Competency and Accrual Based Government Accounting Standard Implementation on the Quality of Local Government Financial Statement with the Implementation of Internal Control System as a Mediating Variable. *Accounting Analysis Journal*, 6(1), 19–26. <https://doi.org/10.15294/aaj.v6i1.20022>
- Syamsudin, S., Imronudin, I., Utomo, S. T., & Praswati, A. N. (2017). Corporate governance in detecting lack of financial report. *JDM (Jurnal Dinamika Manajemen)*, 8(2), 167–176. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jdm/article/view/12757>
- Umar, H., Indriani, A., & Purba, R. B. (2019). THE DETERMINANT FRAUD PREVENTION OF QUALITY LOCAL GOVERNMENT'S FINANCIAL REPORT. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 41–52. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2310>
- Xu, Q., Fernando, G., Tam, K., & Zhang, W. (2019). Financial report readability and audit fees: a simultaneous equation approach. *Managerial Auditing Journal*. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2019-2177>
- Yin, Y., & Tian, R. (2017). Investor sentiment, financial report quality and stock price crash risk: Role of short-sales constraints. *Emerging Markets Finance and Trade*, 53(3), 493–510. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2015.1093844>
- Zhao, Y., Bedard, J. C., & Hoitash, R. (2017). SOX 404, auditor effort, and the prevention of financial report misstatements. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 36(4), 151–177. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2015.1093844>